

**INNOVATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM LORONG WISATA
(STUDI KASUS: LORONG WISATA UMKM DI KECAMATAN RAPPOCINI)**

**MUSTIARA SARI
E011201048**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mustiara Sari

NIM : E011201048

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Innovative Governance Dalam Program Lorong Wisata (Studi Kasus:
Lorong Wisata UMKM Di Kecamatan Rappocini)

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi. Program Sarjana
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 26 Juni 2024

Menyetujui
Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Hasniati S. Sos., M. Si
NIP.196801011997022001

Mengetahui
Ketpa Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwy, M. Si
NIP.196310151989031006

**INNOVATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM LORONG WISATA
(STUDI KASUS: LORONG WISATA UMKM DI KECAMATAN RAPPOCINI)**

**MUSTIARA SARI
E011201048**

Skripsi

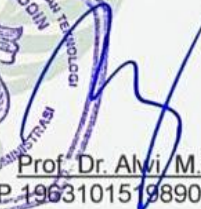
Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik pada
tanggal 24 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Administrasi Publik
Departemen Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Makassar

Mengesahkan
Pembimbing Tugas Akhir


Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si
NIP.196801011997022001

Mengetahui
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,


Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP.196310151989031006



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "*Innovative Governance* Dalam Program Lorong Wisata (Studi Kasus: Lorong Wisata UMKM Di Kecamatan Rappocini)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 Juli 2024

Yang menyatakan,



Mustiara Sari
E011201048

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan Skripsi ini dapat terampungkan atas nikmat, ridho, serta kehendak Allah SWT. dan atas bimbingan, diskusi, dan arahan Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing, Drs. Nelman Edy, M.Si, sebagai penguji 1, dan Nuralamsyah Ismail, S.Sos., MA sebagai Penguji 2. Saya Mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Lurah Ballaparang, Lurah Kassi-Kassi, Bapak/Ibu RT/RW, Dewan Lorong Wisata, Pelaku UMKM, dan Masyarakat Rappocini yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian ini di lapangan serta atas kesempatan mengambil data untuk memperkaya hasil penelitian saya.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin, Dekan serta Wakil Dekan FISIP Unhas, dan seluruh Dosen serta Staff pada Departemen Ilmu Administrasi tanpa terkecuali yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana dalam penelitian ini.

Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rasyidin dan Ibunda Nurlaili yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang selalu diberikan membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki orang tua yang luar biasa.

Terima kasih kepada Humanis FISIP Unhas yang telah menjadi tempat untuk penulis mendapatkan banyak pelajaran, pengetahuan, dan pengalaman. Terima kasih kepada PENA 2020 atas segala cerita, bantuan, suka dan duka selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa. Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai dan sukses selalu untuk kita semua. Panjang umur pertemanan, panjang umur hal-hal baik. Terima kasih juga kepada Komunitas Koin Untuk Negeri yang telah menjadi tempat baru bagi penulis mendapatkan cerita dan pengalaman pengabdian.

Terima kasih kepada Presidium Pengurus Humanis FISIP Unhas Periode 2022/2023 (Muh. Rafliansyah S, Malika, Nurul Ismi Syah, Dristian Seisar Malatta, Fitriani, Nurul Hidayah, Halima Tu'ssadiyah, Muh. Fahmi Yussri, dan Sayyidah Nisa) yang telah menjadi partner terbaik selama ini, tempat berkeluh kesah selama mengemban amanah menjadi presidium, terima kasih telah menjadi rumah atas segala cerita, pengalaman, pembelajaran, dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis selama menjalankan program kerja bahkan selama menjadi mahasiswa.

Terima kasih kepada Sobat DPO Humanis FISIP Unhas Periode 2023 (Fitriani, Nurul Hidayah, Muh. Rafliansyah S, dan Muh. Fahmi Yussri) yang telah menemani penulis untuk mencoba mengambil tanggung jawab lagi di tempat yang

sama. Terima kasih telah kuat melewati serta amanah dalam menjalankan tanggung jawab bersama.

Terima kasih kepada Sahabat Perjuangan (Nur Hafifa Rahman, Raizhah Nurul Ilmi, Nur Sri Wahyuni T.Halid, Nur Fauzi Zaahirah, Pingky Nur Ramadhani) dan juga kepada Calon Mantu Mama Aji (Ifa, Nuni, Eca, Selvi, Rifda, Rara, Indi, Yulis, Musda, Malika) atas segala bantuan baik waktu, pikiran, maupun materi yang diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sahabat yang terbaik dan menjadi semangat bagi penulis selama proses perkuliahan hingga mendapatkan gelar sarjana.

Terima kasih kepada Fitriani dan Nurul Hidayah atas kebersamaannya melewati suka dan duka bersama penulis. Semoga kebersamaannya bertahan lama dan intinya jangan sampai terhambur. Terima kasih juga kepada masandkdigasss (Nur Sri Wahyuni T.Halid, Nurul Ismi Syah, dan Cyndi Clodya) yang telah mewarnai masa mahasiswa baru bersama penulis. Terima kasih juga kepada Trinanda Mawahda yang selalu menemani dan membantu penulis kapanpun dan dimanapun.

Terima kasih kepada Pengurus Humanis FISIP Unhas Periode 2021/2022, dan juga kepada Sobat Biro Periode 2021/2022 (Kak Thoriq, Kak Uta, Kak Ima, Kak Sukma, Kak Fathur, Kak Opi, Sayyida, dan Friel), serta Sobat Biro Manyala Periode 2022/2023 (Eca, Asya, Celsi, Imma, Yeni, Iksan, dan Sultan) atas kerja sama dan kebersamaannya bersama penulis selama menjabat sebagai pengurus.

Terakhir, kepada diri saya sendiri Mustiara Sari, selamat karena sudah melakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak hal yang sulit dan rumit. Terima kasih sudah berproses tanpa banyak protes. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun dalam proses perkuliahan hingga mendapatkan gelar sarjana ini. Tetap bersyukur karena hidup itu bukan untuk saling mendahului, tetapi bermimpilah sendiri-sendiri.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait penelitian ini. Terakhir, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan maupun kekurangan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini. Terima kasih.

Penulis,

Mustiara Sari

ABSTRAK

Mustiara Sari. *Innovative Governance* Dalam Program Lorong Wisata (Studi Kasus: Lorong Wisata UMKM Di Kecamatan Rappocini) (Dibimbing oleh Hasniati)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemerintah dalam memenuhi kriteria *innovative governance* pada program lorong wisata di Kecamatan Rappocini. Program ini hadir sebagai inovasi untuk memanfaatkan potensi-potensi lorong yang ada dalam penanggulangan dampak ekonomi dan pariwisata setelah Covid-19. Penelitian ini dilakukan karena untuk memfokuskan hasil inovasi pemerintah pada program lorong wisata. Sejauh yang dirasakan oleh masyarakat lorong di Kecamatan Rappocini setelah inovasi ini diberlakukan. Selain itu, program lorong wisata ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di lorong ataukah justru sebaliknya. Enam indikator yang digunakan untuk menganalisis dan menilai kriteria *innovative governance* ini adalah dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender dan pengecualian sosial, dan inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi program lorong wisata UMKM di Kecamatan Rappocini belum maksimal pelaksanaannya dalam memenuhi kriteria *innovative governance* menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini karena dari 6 indikator, masih ada 2 indikator yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Indikator yang sudah memenuhi kriteria yaitu kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesetaraan gender dan pengecualian sosial. Selanjutnya, 2 indikator lainnya yang belum maksimal yaitu indikator dampak dan inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer karena pelaku UMKM yang ada di lorong wisata Kecamatan Rappocini tidak mengalami peningkatan pendapatan setelah diterapkannya program ini. Kemudian, program lorong wisata ini sudah mendapatkan penghargaan sehingga dapat menjadi percontohan untuk daerah lain namun belum diterapkan atau dicontohi oleh daerah lain.

Kata Kunci : Inovasi; Lorong Wisata; UMKM.

ABSTRACT

Mustiara Sari. Innovative Governance In The Tourist Hallway Program (Case Study: MSME Tourist Hallway in Rappocini District) (Supervised by Hasniati)

This research aims to determine the government's implementation in fulfilling the criteria for innovative governance in the tourist hallway program in Rappocini District. This program is presented as an innovation to utilize the potential of existing hallway in overcoming the economic and tourism impacts after Covid-19. This research was conducted to focus on the results of government innovation on the tourist hallway program. As far as the community in the hallway in Rappocini District feels after this innovation is implemented. In addition, this tourist hallway program is able to improve the economy of the community in the corridor or otherwise. The six indicators used to analyze and assess the criteria for innovative governance are impact, partnership, sustainability, leadership and community empowerment, gender equality and social exclusion, and innovation in a local context and can be transferred. In this research, the author used a descriptive qualitative approach with a case study design. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of this research indicate that the innovation of the MSME tourist hallway program in Rappocini District has not been optimally implemented in fulfil the criteria for innovative governance according to the United Nations. This is because of the 6 indicators, there are still 2 indicators that have not been optimally implemented. Indicators that have met the criteria are partnership, sustainability, leadership and community empowerment, as well as gender equality and social exclusion. Furthermore, 2 other indicators that have not been maximized are the impact and innovation indicators in the local context and can be transferred because MSME actors in the Rappocini District tourist hallway did not experience an increase in income after the implementation of this program. Then, this tourist hallway program has received an award so that it can be a model for other areas but has not been implemented or emulated by other areas.

Keywords: Innovation; Tourist Hallway; MSMEs.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Teori	4
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat	7
BAB II	8
METODE PENELITIAN	8
2.1 Pendekatan Penelitian	8
2.2. Desain Penelitian	8
2.3 Prosedur	8
2.4 Validitas dan Realibilitas Data	10
BAB III	12
HASIL DAN PEMBAHASAN	12
3.1 Dampak	13
3.2 Kemitraan	18
3.3 Keberlanjutan	21
3.4 Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat	23
3.5 Kesenjangan Gender dan Pengecualian Sosial	30
3.6 Inovasi dalam Konteks Lokal dan Dapat Ditransfer	31
BAB IV	36
KESIMPULAN DAN SARAN	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir.....	7
---------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Penulis.....	41
Lampiran 2. Logbook Penelitian.....	42
Lampiran 3. Surat Izin Meneliti.....	50
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era sekarang ini, tuntutan setiap daerah untuk berkompetitif mengharuskan setiap daerah melaksanakan inovasi dalam pemerintah daerah. Di Indonesia, kajian inovasi sedang gencar diperbincangkan dikalangan pemerintah dan oleh Kementerian dalam negeri itu sendiri. Program-program inovatif setiap daerah menjadi sebuah senjata baru agar bagaimana pemerintah daerah mampu bersaing ditengah-tengah kondisi global (Absar, 2015).

Kesadaran akan pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Pada pasal 386 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip, yaitu peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pemerintah di Indonesia mendorong setiap daerah untuk menghadirkan inovasi dikarenakan inovasi termasuk kunci dalam meningkatkan daya saing daerahnya masing-masing. Guna perbaikan kualitas pelayanan publik, pemerintah terus berupaya mendukung daerah untuk berinovasi salah satunya adalah mengeluarkan sebuah program yang dikenal dengan *One Village One Innovation* (Syafuruddin et al., 2021). Oleh karena itu, dalam sektor pemerintahan inovasi menjadi sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pelayanan publik pada suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada pasal 2 yaitu Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Data dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada *Global Innovation Index* (GII) tahun 2023 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 61 dari 132 negara dapat dikatakan saat ini tingkat produktivitas dan inovasi di Indonesia menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal tersebut dibuktikan dengan Indonesia berhasil naik peringkat yang di mana pada tahun 2022 Indonesia berada di peringkat 75. Setiap tahunnya *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merilis *Global Innovation Index* (GII), indeks ini menilai tingkat produktivitas dan inovasi di bidang ekonomi pada 132 negara di

dunia guna mengukur laju kemajuan dan adopsi teknologi serta dampak sosio ekonomi yang ditimbulkannya. Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur adalah jumlah permohonan kekayaan intelektual yang telah diajukan ke kantor pendaftaran kekayaan intelektual di setiap negara tersebut, dimana jumlah permohonan yang diajukan dapat menjadi suatu cerminan dari tingkat inovasi suatu negara.

Sementara itu, untuk skala nasional inovasi daerah dinilai oleh 3 kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Permen PAN-RB, dan Kementerian PPN/Bappenas. Indeks inovasi daerah yang dirilis Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah mengkategorikan predikat inovasi daerah yaitu sangat inovatif, inovatif, dan kurang inovatif. Kemudian, Permen PAN-RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Kompetisi inovasi yang dimaksud adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan. Adapun pada Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan dalam pedoman pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) bahwa penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Penilaian PPD dilakukan terhadap 4 aspek, yakni pencapaian pembangunan, kualitas dokumen perencanaan, proses penyusunan dokumen perencanaan, dan inovasi.

Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang menempati peringkat 11 dari 34 provinsi dan mendapatkan predikat dengan provinsi yang Inovatif. Selanjutnya, dari total 92 Kota yang ada di Indonesia, kota Makassar berada pada peringkat 45 dari 92 Kota dan termasuk ke dalam kategori Kota yang inovatif di tahun 2022. Jika dilihat dari website Kemendagri, Kota Makassar mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau *Innovative Government Award* (IGA) sejak tahun 2017 hingga 2021 dengan kategori Kota Terinovatif.

Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi berbagai permasalahan diwujudkan salah satunya melalui program Lorong Garden (LONGGAR). Menurut Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata bahwa lorong garden adalah lorong yang memiliki karakteristik hijau, bersih dan pemanfaatan area lingkungan sebagai pengembangan/budidaya tanaman. Lebih lanjut Razak Munir et al (2017) menjelaskan bahwa program lorong garden merupakan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan sebagai *leading sector*. Selain itu, program ini juga melibatkan *stakeholder* lainnya seperti SKPD, sektor privat, dan masyarakat lorong. Untuk menyempurnakan program lorong garden, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata. Program lorong wisata ini tidak hanya berfokus kepada budidaya tanaman, tetapi mengembangkan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis *green garden*, kuliner, dan kerajinan berdasarkan potensi lorong yang dimiliki.

Kehadiran program lorong wisata memanfaatkan potensi-potensi lorong yang ada karena sebagian besar masyarakat di Kota Makassar hidup di lorong. Program ini hadir sebagai inovasi dalam penanggulangan dampak ekonomi dan pariwisata setelah Covid-19. Program lorong wisata menjadi program unggulan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa berdampak langsung kepada masyarakatnya maupun daerahnya. Terbukti, program ini berhasil menghantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan *Indonesian Awards 2023* kategori *Outstanding Award for Integrated Initiative* untuk program lorong wisata (Makassar.go.id, 2023).

Tujuan program lorong wisata pemerintah kota Makassar adalah untuk pemetaan dan klasterisasi potensi lorong berbasis teknologi informasi berdasarkan sumber daya manusia, potensi lingkungan, dan pengembangan ekonomi. Menurut Perwali Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata pasal 5 menyatakan bahwa lorong wisata yang mempunyai potensi, yaitu lorong wisata dengan potensi pengembangan usaha dan kawasan kuliner, potensi pembinaan dan pengembangan budaya & seni, potensi peningkatan budidaya tanaman, potensi pengembangan UMKM, potensi peningkatan industri kecil, potensi pembinaan keumatan/religi dan penataan sarana ibadah, potensi pembinaan pendidikan, potensi pembinaan tanggap bencana, potensi peningkatan teknologi dan informasi, potensi peningkatan Bank Sampah, potensi pengembangan dan peningkatan infrastruktur, potensi peningkatan pelayanan kesehatan, potensi pemetaan aset, potensi pembinaan kepemudaan, potensi pembinaan dan pelayanan kependudukan, dan potensi peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Lorong wisata ini dibentuk dengan konsep yang dapat menarik perhatian wisatawan. Lorong-lorong Kota Makassar yang identik dengan 'sempit' dan 'kotor' kini disulap menjadi bersih dan indah. Lorong wisata dipercantik dengan seni mural dengan berbagai kombinasi warna yang menarik. Program lorong wisata bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan ekonomi salah satunya dengan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Zainuddin, 2021).

Lorong wisata memiliki potensi yang besar untuk pengembangan UMKM. UMKM telah menjadi salah satu sektor penting di Kota Makassar yang membantu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar pada tahun 2022 jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berjumlah 18.815 yang tersebar di 15 kecamatan di kota Makassar. Besarnya minat masyarakat untuk memulai bisnis UMKM ditunjang oleh program Pemerintah Kota Makassar yang mengakomodasi lahirnya berbagai UMKM lorong melalui program lorong wisata yang mampu mengakselerasi pemberdayaan ekonomi masyarakat lorong (Ihsan & Baso, 2023).

Saat ini sudah ada 2.077 lorong wisata yang telah dikembangkan dari total 8.000 lorong yang tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan (PPID Kota Makassar, 2023). Jumlah ini meningkat seiring pembenahan yang terus dilakukan pemerintah Kota Makassar. Salah satu kecamatan yang memiliki lorong wisata,

yaitu kecamatan Rappocini. Kecamatan Rappocini terletak di sebelah utara Kota Makassar yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tamalate. Kecamatan Rappocini terdiri dari 11 kelurahan yang di mana pada tahun 2022 tiap kelurahan memiliki 7 lorong kemudian pada tahun 2023 bertambah lagi 7 lorong per kelurahan. Total ada 14 lorong di tiap kelurahan, kecuali di kelurahan Bua Kana hanya memiliki 10 lorong. Secara umum jenis UMKM yang diberdayakan di Kecamatan Rappocini yaitu kuliner, kerajinan, dan pangan. Kriteria pembentukan lorong wisata ditentukan oleh adanya penduduk dan potensi lorong.

Program lorong wisata merupakan bagian dari implementasi Peraturan Walikota. Kota Makassar berhasil mendapatkan penghargaan melalui program ini. Namun terlepas dari keberhasilan tersebut, hasil observasi awal menunjukkan bahwa secara umum permasalahan yang terjadi di lorong wisata kecamatan Rappocini yakni mengenai kurangnya pemberdayaan masyarakat serta pengembangan UMKM yang masih belum merata. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi et al (2017), yakni di Kota Makassar menggambarkan bahwa kapasitas diri masyarakat yang ada di lorong-lorong Kota Makassar menunjukkan sikap yang apatis atau acuh tak acuh, masyarakat lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bepergian dan mengobrol bersama teman-temannya ketimbang mengerjakan hal-hal positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal tanggung jawab kolektif, masyarakat lorong Kota Makassar belum sepenuhnya mampu mewujudkannya, hal ini terlihat dari masih adanya 'perang' (konflik) antar lorong yang melibatkan kelompok masyarakat yang ada di dalam lorong-lorong tersebut.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan hasil inovasi pemerintah dari program lorong wisata. Sejauh yang dirasakan oleh masyarakat lorong di Kecamatan Rappocini setelah inovasi ini diberlakukan. Selain itu, program lorong wisata ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di lorong ataukah justru sebaliknya. Hal ini penting karena inovasi pemerintah harus mampu memberikan dampak positif bagi objek inovasi itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Innovative Governance dalam Program Lorong Wisata (Studi Kasus: Program Lorong Wisata UMKM di Kecamatan Rappocini)”**.

1.2 Landasan Teori

Inovasi tak lepas dari pergeseran paradigma administrasi publik. Inovasi secara umum muncul di paradigma *New Public Management* (NPM), David Osborn mengatakan bahwa pada NPM menjalankan atau mengelola pemerintahan dengan pendekatan bisnis dan memanfaatkan sektor swasta sehingga mendorong munculnya inovasi. Pada paradigma NPM menjelaskan bahwa sektor publik perlu mengadopsi atau belajar dari sektor privat. Tuntutan kepada sektor publik untuk lebih inovatif, fleksibel, dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan (Schumpeter, 1946 dalam Askary, 2022).

Adanya kritikan terhadap prinsip NPM yang lebih memandang masyarakat itu sebagai pelanggan (*customer*) yang dimana seharusnya pemerintah memfokuskan usahanya untuk melayani dan memberdayakan warga negara. Oleh karena itu, lahirlah prinsip *New Public Service* (NPS). Denhart & Denhart mengatakan bahwa di paradigma NPS tanggung jawab birokrasi lebih diarahkan kepada warga negara (*citizen*) serta mewujudkan kepentingan publik secara berkualitas dan berintegritas. Inovasi memegang peranan sentral dalam NPS karena untuk memenuhi kepentingan publik dibutuhkan cara yang lebih inovatif dalam pelaksanaan pelayanan publik (Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, 2014:14). Lebih lanjut Thahir (2019) menjelaskan bahwa paradigma NPS menekankan adanya melibatkan tiga aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang pada akhirnya melahirkan konsep *governance*. Selanjutnya pergeseran paradigma yang menekankan tata kelola pemerintahan atau *governance* yaitu dengan melihat hubungan relasi antara tiga aktor tersebut dalam menjalankan inovasi. Kemudian, untuk memaksimalkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* maka tercipta konsep *innovative governance* yaitu tata kelola pemerintahan yang inovatif untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. *Innovative governance* atau tata kelola pemerintahan inovatif adalah suatu cara baru yang menjadi terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rahman dan Taringan, 2020). *Innovative governance* bergerak dalam sektor publik sehingga inovasi bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik (Suwarno, 2008:39).

Penelitian ini menggunakan teori kriteria *Innovative Governance* yang dikemukakan oleh *United Nations* (dalam Sangkala, 2013). Peneliti menggunakan teori ini karena konsep yang dikemukakan oleh *United Nations* dapat menganalisis dan menilai kriteria *Innovative Governance* pada program Lorong Wisata di Kecamatan Rappocini. Pada ranah administrasi publik, keberhasilan inovasi dapat dilihat dari penilaian *best practice* yang melihat sejauh mana otoritas dapat melakukan praktik tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dampak (*impact*) adalah inovasi harus memberikan dampak positif serta dapat dilihat, khususnya pada masyarakat yang tidak mampu dan terbukti dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dampak inovasi dapat diukur berdasarkan dua hal yakni dampak ekonomi dan dampak lingkungan.
2. Kemitraan (*partnership*) adalah inovasi harus didasarkan pada kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat setidaknya melibatkan dua pihak berdasarkan adanya hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih, keterbukaan atau kepercayaan antara pihak-pihak tersebut, dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.
3. Keberlanjutan (*sustainability*) dapat dilihat dari; a) legislasi berupa kerangka peraturan oleh hukum; b) kebijakan sosial dan strategi sektoral c) kerangka institusional yakni proses pembuatan kebijakan yang memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab beragam tingkatan dan kelompok

seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan organisasi masyarakat d) sistem manajemen yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mengaktifkan sumber daya.

4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership & community empowerment*) yaitu komitmen pemimpin dalam menjalankan inovasi, kontribusi pemimpin, dan partisipasi masyarakat. Komitmen yang dimaksud adalah sejauh mana pemimpin memiliki kemauan mencapai keberhasilan inovasi. Kontribusi yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam kelancaran inovasi. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah perlibatan masyarakat pada kegiatan yang dapat mendorong keberhasilan inovasi.
5. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial (*gender equality & social inclusion*) yaitu kesetaraan, keadilan, dan kebebasan akses yang mengacu pada gender, usia, fisik/mental, pendapatan, serta mengakui kemampuan masyarakat yang berbeda. Kesetaraan yang dimaksud adalah adanya kedudukan yang sama. Keadilan yang dimaksud semua masyarakat harus diperlakukan secara adil. Kebebasan akses yang dimaksud adalah tidak adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (*innovation within local content & transferability*) yaitu kemampuan untuk di transfer ke tempat lain dan adopsi pengetahuan. Kemampuan untuk di transfer ke tempat lain yang dimaksud adalah inovasi mendapatkan penghargaan sehingga dapat menjadi percontohan. Adopsi pengetahuan yang dimaksud adalah inovasi ini telah di contoh oleh beberapa daerah.

Setiap indikator di atas akan digunakan untuk membedah masalah yang dibahas dengan menganalisis dan menilai kriteria *Innovative Governance* pada program lorong wisata di Kecamatan Rappocini sebagaimana tergambar pada kerangka pikir di bawah ini.

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir



Sumber: diolah peneliti, 2024

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah “bagaimana penerapan *innovative governance* dalam program lorong wisata di Kecamatan Rappocini?”

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemerintah memenuhi kriteria *innovative governance* dalam program lorong wisata di Kecamatan Rappocini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini merupakan pengayaan terhadap kajian dalam studi administrasi publik sekaligus menjadi sarana dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah maupun perangkat daerah di Kota Makassar dalam melaksanakan inovasi pemerintah khususnya pada program lorong wisata.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2018) mendefinisikan pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok.

2.2. Desain Penelitian

Cresswell (2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi pendekatan kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus. Strategi penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus. Strategi ini menekankan pada desain penyelidikan yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus yang seringkali berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, dari satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi terperinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Kemudian, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Artinya, data yang diperoleh akan dilaporkan dalam bentuk narasi atau gambar dengan tujuan untuk menjelaskan realitas yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan adanya penelusuran dengan menggunakan teori yang bisa mengembangkan pemahaman mengenai kasus yang dialami. Dengan menggunakan metode penelitian ini dapat memudahkan peneliti agar bisa mendapatkan data yang digunakan untuk menganalisis dan juga menilai kriteria *Innovative Governance* pada Program Lorong Wisata di Kecamatan Rappocini.

2.3 Prosedur

a. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap dapat menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Adapun informan tersebut antara lain:

1. Kepala Bidang Konsumsi dan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
2. Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar
3. Lurah Ballaparang
4. Lurah Kassi-Kassi
5. Dewan Lorong Wisata Kuliner Kelurahan Ballaparang
6. Dewan Lorong Wisata Silves Kelurahan Ballaparang
7. Dewan Lorong Wisata Sipadaidi Kelurahan Kassi-Kassi
8. Ketua RT 03 Kelurahan Ballaparang

9. Ketua RT 04 Kelurahan Kassi-Kassi
10. Ketua RW 01 Kelurahan Ballaparang
11. 4 Pelaku UMKM Lorong Wisata
12. Direktur Yayasan Peduli Negeri

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sekumpulan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan. Creswell (2018) menjelaskan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu langkah yang digunakan oleh peneliti melalui pengamatan secara langsung di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran sikap/tindakan, perkataan/pembicaraan, interaksi dan kondisi lingkungan yang ada.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Hal ini dilakukan guna memperoleh data yang bersifat deskriptif, persepsi, pendapat dan perasaan, keyakinan dan pengalaman dari para informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat berupa memorabilia, korespondensi, dan audiovisual. Hal ini bertujuan untuk menghimpun dan menelaah dokumen yang diperoleh. Teknik ini digunakan sebagai pendukung wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga hasil penelitian bersifat argumentatif dan kredibel.

c. Teknik Analisis Data

Creswell (2018) menjelaskan bahwa analisis data bertujuan untuk memahami data teks dan gambar. Sehingga, dalam prosesnya melibatkan segmentasi dan pemisahan data kemudian menyatukannya kembali. Lebih lanjut, Creswell (2018) menjelaskan beberapa tahapan dalam analisis data yaitu sebagai berikut.

1. Mengatur dan Mempersiapkan Data (*Organizing and Preparing Data*)

Tahapan awal dalam analisis data yaitu mengatur dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Hal ini melibatkan transkripsi wawancara, pemindaian optik bahan, mengetik catatan lapangan, membuat katalog semua bahan visual. Selanjutnya menyortir dan mengatur data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca dan Memahami Data (*Reading Through All Data*)

Langkah ini memberikan gambaran umum mengenai informasi dan merefleksikan makna secara keseluruhan. Hal ini seperti apa gagasan umum yang disampaikan informan, apa idenya, hingga apa kesan keseluruhan kedalaman, kredibilitas, dan penggunaan informasi.

3. Mengkodekan Data (*Coding the Data*)

Tahapan ini merupakan proses pengorganisasian data dengan memberi tanda atau kode. Selanjutnya menulis catatan-catatan khusus mengenai data yang diperoleh. Semua data (kalimat atau gambar) yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori dan memberi nama atau label pada kategori tersebut. Pemberian nama atau label tersebut seringkali didasarkan pada bahasa asli atau ucapan sebenarnya dari informan.

4. Menghasilkan Tema/Deskripsi (*Interrelating Themes/Description*)

Tahapan ini menggunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi latar atau orang serta kategori atau tema untuk dianalisis. Deskripsi melibatkan penyampaian informasi secara rinci tentang orang, tempat, atau peristiwa dalam suatu latar. Selain itu, penggunaan kode juga dilakukan untuk menghasilkan sejumlah kecil tema atau kategori. Tema-tema inilah yang akan muncul sebagai temuan utama dalam penelitian kualitatif.

5. Menginterpretasi Makna Tema/Deskripsi (*Interpreting the Meaning of Themes/Descriptions*)

Tahapan ini merupakan yang terakhir dalam teknik analisis data. Deskripsi dan tema yang ada kemudian direpresentasikan dalam narasi kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah menggunakan bagian naratif untuk menyampaikan temuan analisis.

2.4 Validitas dan Realibitas Data

Gibbs dalam Creswell (2018) berpendapat bahwa validitas kualitatif berarti peneliti memeriksa keakuratan temuan dengan menggunakan prosedur tertentu, sedangkan realibitas kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan peneliti konsisten pada penelitian yang berbeda dan proyek yang berbeda.

- Mendefinisikan validitas kualitatif

Creswell & Miller dalam Creswell (2018) berpendapat bahwa validitas adalah salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuannya akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca suatu laporan. Banyak istilah dalam literatur kualitatif yang membahas validitas, seperti kepercayaan, keaslian, dan kredibilitas.

- Menggunakan beberapa prosedur validitas

Perspektif procedural yang direkomendasikan untuk proposal penelitian adalah mengidentifikasi dan mendiskusikan satu atau lebih strategi yang tersedia untuk memeriksa keakuratan temuan. Peneliti harus secara aktif memasukkan strategi validitas ke dalam proposal mereka.
- Menggunakan keandalan kualitatif

Yin dalam Creswell (2018) menyarankan agar peneliti kualitatif perlu mendokumentasikan prosedur studi kasus mereka dan mendokumentasikan sebanyak mungkin langkah dalam prosedur tersebut. Beliau juga merekomendasikan untuk menyiapkan protocol dan database studi kasus yang terperinci, sehingga orang lain dapat mengikuti prosedurnya.
- Generalisasi kualitatif

Menurut Gibbs dalam Creswell (2018), generalisasi kualitatif adalah istilah yang digunakan secara terbatas dalam penelitian kualitatif, karena maksud dari bentuk penyelidikan ini bukanlah untuk menggeneralisasi temuan pada individu, lokasi atau tempat di luar yang diteliti.